

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH DAN  
AKSESIBILITAS LAPORAN  
KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
TRANSPARANSI DAN  
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH  
KOTA AMBON**

**Salomi J. Hehanussa**

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas  
Kristen Indonesia Maluku Email :  
yamy.hehanussa@yahoo.com

**PENDAHULUAN**

Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai konsekuensi dari otonomi daerah, sehingga menyebabkan perubahan signifikan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, pemerintah harus dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan dimana pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penelitian yang menguji pengaruh penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah, memperoleh bukti empiris bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia serta aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut (Mulyana, 2006; Safitri, 2009).

Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik, telah

mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, mendorong pengungkapan dan pengkomunikasian hasil-hasil kepada *stakeholders*. Namun upaya perbaikan mengenai penyajian pelaporan keuangan daerah ini nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Upaya reformasi penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun di jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah. Perubahan pendekatan akuntansi pemerintah daerah dari *single entry* menuju *double entry* merupakan perubahan yang cukup revolusioner. Di sisi lain, publikasi laporan keuangan oleh pemerintah daerah melalui berbagai media cetak maupun elektronik, belum menjadi hal yang umum bagi sebagian daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pasal 116 ditambahkan satu ayat, yaitu ayat 4a yang bunyinya: “Untuk memenuhi asas tansparansi, kepala daerah wajib menginformasikan substansi APBD kepada masyarakat yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah”.

Objek penelitian ini yaitu pemerintahan Kota Ambon. Tujuan penelitian ini yaitu ingin menguji: (1) Bagaimana pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; (2) Bagaimana pengaruh aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah; dan (3) Apakah penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**KAJIAN PUSTAKA DAN  
PENGEMBANGAN HIPOTESIS**  
*Penyajian Laporan Keuangan*

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan (Mardiasmo, 2002). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (2005) menyebutkan bahwa tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, dengan: 1) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran; 2) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan; 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai; 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. Komponen pelaporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*) dan laporan keuangan.

Komponen pelaporan keuangan merupakan satu set laporan, terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; (3) Neraca; (4) Laporan Operasional; (5) Laporan Arus Kas; (6) Laporan Perubahan Ekuitas; (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban entitas pelaporan pada tanggal pelaporan dan arus sumber daya ekonomi selama periode berjalan. Informasi ini diperlukan pengguna untuk melakukan penilaian terhadap kemampuan entitas pelaporan dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di masa mendatang.

Entitas pelaporan menyajikan informasi untuk membantu para pengguna dalam memperkirakan hasil operasi entitas dan pengelolaan aset, seperti halnya dalam pembuatan dan evaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting. Pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas (Diamond, 2002). Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 1, alinea 49, (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) dinyatakan bahwa neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: kas dan setara kas; investasi jangka pendek; piutang pajak dan bukan pajak; persediaan; investasi jangka panjang; aset tetap; kewajiban jangka pendek; kewajiban jangka panjang; dan ekuitas dana.

Menurut Diamond (2002), informasi keuangan di dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat yaitu: (1) meningkatkan akuntabilitas para manajer (kepala daerah dan para pejabat pemda) untuk tidak saja bertanggung jawab pada kas masuk dan kas keluar, tetapi juga pada aset dan utang yang dikelola; (2) meningkatkan transparansi dari aktivitas pemerintah. Pemerintah umumnya mempunyai jumlah aset yang signifikan dan utang. Pengungkapan atas informasi

ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. (3) memfasilitasi penilaian posisi keuangan dengan menunjukkan semua sumber daya dan kewajiban; (4) Memberikan informasi yang lebih luas yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan.

#### **Akseibilitas Laporan Keuangan**

Rohman (2009), mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam perspektif tata ruang adalah keadaan atau ketersediaan hubungan dari suatu tempat ke tempat lainnya atau kemudahan seseorang atau kendaraan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, nyaman, serta kecepatan yang wajar. Di sisi lain, Mulyana (2006) mengemukakan bahwa aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002), laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan (*accountability dan stewardship*). Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola keuangan publik berhak untuk mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap pemerintah (Mardiasmo, 2002). Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas jika pemerintah daerah terus meningkatkan aksesibilitas laporan keuangannya. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan cara

memfasilitasi berbagai pihak yang berkepentingan agar dapat mengetahui atau memperoleh laporan keuangan dengan mudah. Dalam demokrasi yang terbuka, akses ini tersedia di berbagai media, seperti surat kabar, majalah, stasiun televisi, dan internet.

#### **Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah**

Transparansi artinya keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lain yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media. Pertanggungjawaban pemerintah daerah yang transparansi dan akuntabilitas terhadap penyajian laporan keuangan, diharapkan dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa asas umum pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut: (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan

bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat; (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (4) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; (5) Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu; (6) Ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah; (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah; (8) Bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan; (9) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif; (10) Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional; (11) Manfaat untuk

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

## **METODE PENELITIAN**

### ***Identifikasi Variabel Penelitian***

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu penyajian laporan keuangan daerah (X1) dan aksesibilitas laporan keuangan daerah (X2). Sedangkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan variabel dependen.

### ***Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel***

Penyajian laporan keuangan yaitu suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Aksesibilitas laporan keuangan adalah kemampuan untuk memberikan akses bagi *stakeholder* untuk mengetahui atau memperoleh laporan keuangan sebagai bagian dari partisipasi *stakeholder*. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah tingkat pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang bersifat komprehensif dan mencakup aspek kebijakan serta penggunaan anggaran kepada publik.

Pengukuran variabel menggunakan skala likert dimana responden menyatakan pendapatnya terhadap pernyataan. Skor jawaban adalah dari 1 sampai dengan 5. Skor 1 = sangat tidak setuju, Skor 2 = tidak setuju, Skor 3 = netral, Skor 4 = setuju, Skor 5 = sangat setuju.

### ***Populasi dan Sampel***

Populasi penelitian ini yaitu pengguna eksternal laporan keuangan (pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan) Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. Sampel penelitian ini sebanyak 82 orang responden yang terdiri dari pegawai Pemkot Ambon, Dosen Perguruan Tinggi di Kota Ambon, dan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dan Jurusan Akuntansi.

Kriteria dan alasan pemilihan sampel yaitu: (1) pegawai pemkot Ambon sebagai pengguna laporan keuangan yang disajikan pemerintah daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai pemkot yang dijadikan responden adalah mereka yang telah bekerja lebih dari 2 tahun. (2) Akademi dan mahasiswa selaku *stakeholder* pemerintah merupakan pengguna potensial laporan keuangan pemkot Ambon yang mempunyai rentang variabilitas pemahaman dan kepedulian akan laporan keuangan yang cukup tinggi. Mahasiswa yang dijadikan responden adalah mereka yang minimal berada di semester empat.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan metoda survey melalui penyebaran kuesioner yang diberikan kepada responden yang diteliti dalam penelitian ini.

#### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan meliputi uji penyimpangan asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Uji penyimpangan asumsi klasik terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas. Sedangkan model persamaan regresi penelitian ini yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

dimana:

Y = Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

X1 = Penyajian laporan keuangan daerah

X2 = Aksesibilitas laporan keuangan daerah

a = konstanta

b1, b2 = koefisien regresi

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Uji Validitas dan Reliabilitas**

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Colleration*. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka data dikatakan valid, dimana  $r_{tabel}$  untuk N = 82, adalah 0,1829. Dari hasil olahan data, semua instrument penelitian dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitas

instrumen, semakin dekat koefisien keandalan dengan 1,0 maka akan semakin baik. Dari hasil olahan data, keandalan berkisar antara 0,7 sampai 0,80 sehingga semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

### **Uji Normalitas**

Hasil uji normalitas menyatakan nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebesar 0,630 dengan signifikan 0,837 dapat dinyatakan data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal.

### **Uji Penyimpangan Asumsi Klasik**

Sesuai hasil uji multikolinieritas untuk seriap variabel, diperoleh nilai VIF lebih kecil dari 5 sehingga disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinieritas antar variable independen. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa model regresi layak digunakan untuk memprediksi transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan masukan penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah. Sedangkan hasil uji autokorelasi memperlihatkan nilai Durbin Watson berada di sekitar angka dua, jadi model regresi terbebas dari autokorelasi.

### **Uji Koefisien Determinasi**

Dari tampilan *output SPSS model summary* diperoleh besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,315. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variable penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan adalah sebesar 31,50%, sedangkan 68,50% lainnya ditentukan oleh faktor lain diluar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

### **Koefisien Regresi**

Model estimasi yang diperoleh dari hasil pengolahan data adalah:

$$Y = 18,320 + 0,316 X_1 + 0,604 X_2 + e$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta sebesar 18,320 mengindikasikan bahwa jika variabel independen yaitu penyajian laporan keuangan dan aksesibilitas laporan keuangan adalah nol maka akuntabilitas

- pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar konstanta 18,380.
- b. Koefisien penyajian laporan keuangan sebesar 0,316 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan penyajian laporan keuangan satu satuan akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sebesar 0,316 satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
  - c. Koefisien aksesibilitas laporan keuangan sebesar 0,604 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan aksesibilitas laporan keuangan, maka akan mengakibatkan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Ambon sebesar 0,604 dengan asumsi variabel lain konstan.

#### ***Uji Hipotesis***

Hasil uji terhadap hipotesis 1, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,096 dengan tingkat signifikansi 0,025 yang lebih kecil dari 0,05. Pengujian hipotesis 2 diperoleh hasil bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki t-hitung sebesar 3,985 dengan tingkat signifikan 0,014 yang lebih kecil dari 0,05. Uji F menunjukkan hasil sebesar 40,318 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05.

#### ***Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah***

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Ambon berpengaruh signifikan dan positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas (Nordawan, 2010). Penyajian laporan keuangan yang baik adalah salah satu faktor untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus bisa menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar

akuntansi pemerintahan yang diterima umum. Pengungkapan atas laporan keuangan merupakan elemen penting untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Ini berarti, semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diterima. Artinya, dengan meningkatnya penyajian laporan keuangan daerah akan berimplikasi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyana (2006) yang menyatakan bahwa salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah secara lengkap dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan.

#### ***Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah***

Untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan kepada masyarakat dengan mengembangkan sistem informasi keuangan daerah. Selain menyajikan laporan keuangan, hal lain yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan akses laporan keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Alasannya adalah apalah artinya menyajikan laporan keuangan tapi tidak memberikan kemudahan akses bagi pengguna laporan keuangan, maka usaha untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak akan berjalan maksimal.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mulyana (2006) yang meneliti tentang pengaruh penyajian neraca daerah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil pengujian juga membuktikan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan Penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terbukti dan diterima. Hasil empiris ini menunjukkan bahwa dengan menyajikan laporan keuangan daerah dan memberikan kemudahan akses terhadap laporan keuangan daerah bagi para pengguna ternyata akan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyana (2006).

### **SIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI**

Hasil pengujian secara empiris membuktikan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan secara baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah daerah tetap terlaksana dengan baik serta mampu meminimalisasi praktek korupsi oleh para aparatur sehingga *good governance* dan

*clean government* akan terwujud di pemerintahan Kota Ambon.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah juga ditemukan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas transparansi dan akuntabilitas akan tergantung pada akses publik terhadap laporan pertanggungjawaban maupun laporan temuan yang dapat dibaca dan dipahami. Dengan demikian, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas yang efektif, pemerintah dapat menggunakan berbagai media untuk mempublikasikan laporan keuangannya dan/atau menggunakan forum yang dapat memberikan perhatian langsung guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah Kota Ambon terhadap masyarakat.

Bukti empiris juga memperlihatkan bahwa penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan daerah merupakan salah satu upaya konkrit guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan metode survei menggunakan kuesioner tanpa dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan. Penelitian mendatang dapat menggunakan metode wawancara guna melengkapi analisa dan pembahasan. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan variabel lain yang mempunyai pengaruh kuat terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini terbatas pada penentuan pemilihan responden yang digunakan sehingga penelitian mendatang dapat memperluas sampel penelitian.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Diamond Jack. 2002. "Performance Budgeting-Is Accrual Accounting

- Required?”. *IMF Working Paper. Fiscal Affairs Department.*
- Ghozali Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 5. BP: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Governmental Accounting Standard Board, 1998, *Governmental Accounting and Financial Reporting Standards*. GASB, Norwalk, Conn.
- Halim Abdul dan M. Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah* Edisi Empat. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Indriantoro Nur dan Bambang Supomo. 1999. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE: Yogyakarta
- Ismail Mohamad, Sjahrudin Rasul dan Haryono Umar. 2004. *Konsep dan Pengukuran Akuntabilitas*. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- Jones, D. B, 1985.” The Needs of Users of Governmental Financial Reports”. *Government Accounting Standards Board.*
- Jones Rowan dan Maurice Pendlebury. 2000. *Public Sector Accounting*. 5<sup>th</sup> Edition. Prentice Hall, London. Kuncoro Mudrajad. 2003. *Metoda Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Menteri Dalam Negeri. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung-jawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Mulyana Budi. 2006. “Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan* Vol.2 No. 1, Mei 2006.
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Nordiawan Deddi. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2002 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan



- Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Rochman Abdul. 2009. "Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* Vol. 9 No. 1. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ryan Christine, Trevor Stanley dan Morton Nelson. 2002. "Accountability Disclosure by Queensland Local Government Councils: 1997-1999." *Financial Accountability & Management*. Vol. 18 (3).
- Safitri Ratna Amalia. 2009. *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Semarang)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung: Msandar Maju.
- Shende Suresh dan Tony Bennet. 2004. *Concept Paper 2: Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. UN DESA.
- Yani, Ahmad. 2009. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.